

MENUMBUHKAN SPIRIT TOLERANSI GENERASI MILENEAL DALAM MEREDUKSI ISU PRIMORDIAL PADA PEMILU TAHUN 2024 DI KABUPATEN SEMARANG

Setiajid¹, Martien Herna Susanti², Slamet Sumarto³, Rahel Gloria Pranoto⁴

¹Program Studi Ilmu Politik, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

²Program Studi Ilmu Politik, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

³Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

⁴Program Studi Ilmu Politik, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

*Korespondensi : (martien_herna@yahoo.com)

Abstrak

Pada Pemilu tahun 2024, penggunaan media sosial tidak jarang dimanfaatkan oleh sejumlah elit untuk menyebarkan isu primordialisme berdasarkan sentimen etnis, agama, dan daerah sebagai strategi memperoleh dukungan. **Permasalahan mitra:** (1) rendahnya pengetahuan generasi milenial tentang kepemiluan; dan (2) tingginya potensi dimanfaatkannya generasi milenial oleh peserta Pemilu tahun 2024. **Tujuan kegiatan pengabdian:** (1) memberikan pengetahuan pentingnya generasi milenial cerdas menggunakan hak pilih pada Pemilu tahun 2024; dan (2) memberikan kesadaran pentingnya spirit toleransi dalam mereduksi isu primordial pada Pemilu tahun 2024. Metode pelaksanaan pendidikan masyarakat berupa sosialisasi. Hasil kegiatan menunjukkan, setelah mengikuti sosialisasi, peserta mampu memahami urgensi hak pilih serta mendeteksi informasi berita hoaks dan *black campaign* yang menyesatkan pemilih. Spirit toleransi perlu terus ditumbuhkembangkan dalam rangka meminimalisir isu primordial yang berpotensi menimbulkan disintegrasi bangsa. Kesimpulan, toleransi menjadi hal penting guna menangkal isu-isu primordialisme yang berdampak disintegrasi.

Kata kunci: *Toleransi, Generasi Milenial, Primordialisme*

Abstract

In the 2024 elections, the use of social media is often used by a number of elites to spread the issue of primordialism based on ethnic, religious, and regional sentiments as a strategy to gain support. Partner problems: (1) the millennial generation's low knowledge about elections; and (2) the high potential for utilization of the millennial generation by participants in the 2024 General Election. The objectives of the service activities are: (1) to provide knowledge about the importance of the intelligent millennial generation in using their right to vote in the 2024 General Election, and (2) to provide awareness of the importance of the spirit of tolerance in reducing primordial issues in the 2024 elections. The method for implementing community education is in the form of socialization. The results of the activity showed that, after participating in the socialization, participants were able to understand the urgency of voting rights and detect hoax news and black campaign information that misled voters. The spirit of tolerance needs to continue to be developed in order to minimize primordial issues that have the potential to cause national disintegration. In conclusion, tolerance is important to ward off issues of primordialism which have a disintegrating impact.

Keywords: *Tolerance, Millennial Generation, Primordialism*

Submit: Mei 2024

Diterima: Mei 2024

Publish: Mei 2024



Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY-NC-ND 4.0)

. 1. PENDAHULUAN

Hasil survei tim Riset dan Analitik Kompas Gramedia Media bersama dengan Litbang Kompas menunjukkan tingginya antusiasme kaum milenial (lahir tahun 1981-1996) dan generasi Z (lahir tahun 1997-2012) untuk mengikuti Pemilu 2024. Sebanyak 86,7 persen menyatakan bersedia untuk berpartisipasi dalam Pemilu. Sementara 10,7 persen masih menimbang dan 2,6 persen lainnya menolak mengikutinya (Yunita, 2022). Antusiasme tersebut perlu disikapi secara bijak oleh pihak-pihak terkait agar generasi milenial ini dapat berpartisipasi secara cerdas dan bijak demi masa depan demokrasi Indonesia di tengah gencarnya isu primordialisme strategi memperoleh dukungan massa.

Pasca reformasi politik Indonesia tahun 1998 memberikan ruang konstelasi yang lebih besar dalam memperjuangkan kepentingan berdasarkan kelompok. Hal ini menjadikan primordialisme menguat, bahkan menjadi simbol dan bahasa politik dalam strategi meraih legitimasi dan simpati guna memenangkan kontestasi politik. Sejarah membuktikan, isu politis latar belakang primordial calon presiden dan kepala daerah menjadikan masyarakat terbelah menjadi *in-group vs out-group*, maka dari sisi psikologis, politisasi primordial memiliki dampak berkelanjutan bagi kubu kelompok yang kalah, akibat trauma mental berkepanjangan, teror, dan intimidasi oleh kubu kelompok lawan politik. Sebaliknya kelompok pemenang mengambil seluruh kesempatan tanpa menyisakan sedikitpun bagi kelompok yang kalah atau *the winner takes all* (Soeharso, 2019).

Hadirnya politik primordialisme dalam politik Indonesia

dilatarbelakangi dua faktor: *Pertama*, pelaksanaan proyek politik desentralisasi yang merubah lokus kajian pengamat politik dan pemerintah lebih mendalami hadirnya fenomena etnisitas, kedaerahan dan adat dalam panggung politik. *Kedua*, menguatnya pemanfaatan simbol-simbol primordialisme seiring proses liberalisasi politik yang ditandai dengan kehadiran sistem politik yang multipartai dengan sistem pemilihan secara langsung dengan suara terbanyak. Potensialnya isu primordialisme dalam menarik dukungan massa, menjadikan kandidat politik berlomba-lomba menggunakannya semata-mata untuk kepentingan politiknya.

Menurut Maruto, primordialisme merupakan perasaan yang lahir dari yang dianggap ada dalam kehidupan sosial sebagian besar dari hubungan langsung dan hubungan keluarga, tetapi juga meliputi keanggotaan dalam lingkup keagamaan, bahasa, atau dialek tertentu serta kebiasaan-kebiasaan sosial. Josef Riwu Kaho dan Cornelis Lay mendefinisikan primordialisme adalah ikatan kekekrabatan, kesamaan suku bangsa, daerah, dan adat istiadat. Selanjutnya Ubed Abdillah menjelaskan, primordialisme secara umum sebagai anggapan kelompok-kelompok sosial yang dikarakteristikkan oleh gambaran seperti kewilayahan, agama, kebudayaan, bahasa, dan organisasi sosial yang memang didasari secara objek sebagai *given* dan tidak bisa dibantah (Muhtar, 2015).

Sikap primordial berfungsi melestarikan budaya kelompok, namun dalam kaitannya dengan demokrasi, hal tersebut semakin menjauhkan dari substansi demokrasi yang idealnya menghasilkan pemimpin bangsa yang

mampu membawa Indonesia mencapai tujuannya sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945 alinea 4 (empat) yaitu, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap tumpah darah dan bangsa Indonesia serta ikut dan berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial guna mencapai visi bersama mewujudkan masyarakat yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Menjelang Pemilu, isu-isu primordialisme didominasi persoalan suku, agama, dan ras yang dimanfaatkan para elit, khususnya kepada *floating mass* atau massa mengambang yang dalam hal ini generasi milenial. Dalam situasi demikian, urgensi toleransi diperlukan agar Pemilu menjadi sarana kedaulatan rakyat yang substansial tidak prosedural belaka. Toleransi adalah saling pengertian, saling menghormati, dan menghargai kesetaraan sebagai pedoman dalam kehidupan berpolitik yang santun, cerdas dan menempatkan bangsa dan negara di atas kepentingan partai dan golongan. Pemilih yang santun ditandai dengan sikap mengedepankan etika dan moral yang ditunjukkan dalam sifat kedewasaan saat berdialog, meutamakan kepentingan bangsa dan negaranya, serta bijak dalam menggunakan hak pilihnya. Pemilih cerdas adalah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan pertimbangan rekam jejak, visi misi, dan program kerjanya kandidat yang berkompetisi, memiliki komitmen melawan *money politic*, dan tidak mudah terpengaruh berita hoaks (Junaidi, 2013). Samuel P. Huntington dan Joan Nelson mendefinisikan partisipasi politik sebagai kegiatan

warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah, karena partisipasi dapat bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadik, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif (Budihardjo, 2007).

Pemilu merupakan arena kompetisi untuk mengisi jabatan-jabatan politik di pemerintahan yang didasarkan pada pilihan formal dari warga negara yang memenuhi syarat. Terdapat beberapa indikator Pemilu yang demokratis, yaitu: (1) regulasi Pemilu yang jelas dan tegas. Regulasi yang jelas dan tegas dimaksudkan agar tidak menimbulkan multi tafsir; (2) kemampuan partai Politik menyiapkan kadernya yang kompeten. Kompetensi kader yang baik akan dapat menghadapi tantangan kompetisi dalam Pemilu, serta regulasi yang terkait tentang Pemilu, seperti UU Pemilu, UU Penyelenggara Pemilu, serta UU Partai Politik; (3) adanya pemilih yang cerdas. Pemilih yang cerdas memiliki peran yang sangat signifikan dan menentukan terpilihnya pemimpin yang amanah. Pemilih cerdas akan menolak politik transaksional seperti *money politic*, *buying vote*, dan tindak kecurangan Pemilu lainnya; dan (4) keberadaan penyelenggara Pemilu yang profesional, kredibel dan berintegritas. Penyelenggara Pemilu menjadi garda terdepan pelaksanaan Pemilu yang mengedepankan asas Pemilu yang Luber dan Jurdil (Imron, 2014).

Sebaliknya Pemilu yang manipulatif, Pemilu yang penuh dengan pelanggaran, korupsi atau rekayasa. Birch mendefinisikan malpraktek Pemilu yaitu manipulasi proses dan

hasil pemilu semata-mata untuk keuntungan pribadi atau partisan bagi kepentingan publik dengan menggunakan istilah pemilu (*electoral fraud*). Lopez-Pintor menjelaskan, setiap tindakan sengaja yang diambil untuk merusak kegiatan Pemilu dan materi terkait Pemilu untuk mempengaruhi hasil Pemilu, yang dapat mengganggu dengan atau menggagalkan keinginan para pemilih (Surbakti et al., 2014).

1. METODE PELAKSANAAN

Khalayak sasaran adalah anggota Karang Taruna Desa Kenteng, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. Lokasi pengabdian di Balai Desa Kenteng, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. Metode pelaksanaan adalah sosialisasi yang dibagi menjadi 3 (tiga) tahap, yaitu: (1) persiapan. Tahap persiapan dimulai dengan memberikan pengetahuan dan informasi kepada generasi milenial tentang urgensi menggunakan hak pilih pada Pemilu tahun 2024; (2) pelaksanaan. Pada tahap ini, tim pengabdian memberikan pengetahuan terkait kepemiluan. Pemilu diyakini oleh negara-negara demokrasi sebagai sarana kompetisi terbaik untuk meraih jabatan politik di pemerintahan; dan (3) monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi, dilakukan melalui aktivitas tanya jawab dan diskusi untuk mengetahui Tingkat pemahaman peserta atas materi dan komitmen menjadi pemilih yang cerdas dan berintegritas.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian bertujuan memberikan pendidikan politik kepada generasi milenial tentang kepemiluan. Berdasarkan perhitungan daftar Pemilih Tetap Pemilu 2024

mendatang, sekitar 66,8 juta dari 204 juta lebih pemilih adalah generasi milenial. Oleh karena itu partisipasi generasi milenial sangat mempengaruhi hasil pemilu. Jika terdapat pertanyaan sejauhmana antusiasme kaum milenial (lahir tahun 1981-1996) dan generasi Z (lahir tahun 1997-2012) untuk mengikuti Pemilu 2024, maka berdasarkan survey: 1) 86,7 persen menyatakan bersedia untuk berpartisipasi dalam Pemilu; Sementara 10,7 persen masih menimbang; dan 3) 2,6 persen lainnya menolak (Yunita, 2022).

Berdasarkan asesmen awal, dapat disimpulkan, bahwa generasi milenial belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang Pemilu tahun 2024. Bekal pengetahuan yang diberikan melalui kegiatan pengabdian ini diharapkan mampu mereduksi pendekatan primordial pada Pemilu Tahun 2024 yang dilakukan oleh para kandidat dan atau partai politik sehingga generasi milenial akan dapat menggunakan hak pilinya secara cerdas dan bijak yang sinergis dengan program pemerintah khususnya prioritas nasional ke 4 yaitu revolusi mental dan pembangunan kebudayaan (Bappenas, 2020).

Anggota karang taruna umumnya termasuk dalam kategori generasi milineal, bahkan generasi Z. Hal ini sesuai dengan tahun kelahiran yang oleh Troksa (2016) dikelompokkan menjadi enam, yaitu generasi WW II (Perang Dunia Kedua) tahun 1901-1924, Silent (1925-1945), Baby Boomer (1946-1964), X (1965-1980), milenial atau generasi Y (1981-2003, dan Z (2003-saat ini). Kurun waktu sebuah generasi dimulai dan berakhir dikaitkan dengan peristiwa besar yang terjadi pada saat itu (Setiawan & Puspitasari, 2018).

Generasi milenial sangat intens dalam bermedia sosial. Kondisi ini menyebabkan sangat rawan untuk digunakan pihak-pihak tertentu yang berkepentingan, mengingat generasi milenial dan khususnya generasi Z masih minim latar belakang pengetahuan politiknya. Selain itu, berdasarkan observasi awal, aparat desa Kenteng menyatakan, bahwa anggota karang taruan Desa Kenteng belum pernah memperoleh materi kepemiluan dari pihak-pihak terkait.

Strategi agar dapat mengurai persoalan: *Pertama*, kecenderungan juga mendukung yang memiliki rekam jejak baik dalam memenuhi janji kampanye; 2) Berikutnya melihat visi dan misi politik, integritas, pengalaman politik, dan latar belakang sosok pemimpin, dan 3) Kekhawatiran terhadap pemimpin masa depan sudah termanifestasi di media sosial, melalui video, tulisan, dan bahkan musik.

Toleransi mengandung arti sikap (hidup berdampingan secara damai) antar sesama kelompok masyarakat yang terikat dalam nilai-nilai, norma, budaya, dan keyakinan yang beragam dan berbeda-beda) (Rahman et al., 2013). Toleransi juga diartikan sebagai pilihan yang cerdas dalam memperkuat solidaritas kebangsaan dan kenegaraan. Selanjutnya toleransi politik berarti mampu menerima setiap perbedaan pilihan politik yang ada, tanpa harus dibenturkan dengan nilai atau budaya Masyarakat. Penggunaan nilai atau budaya masyarakat untuk kepentingan sesaat sekelompok elit menyebabkan munculnya penggunaan politik identitas yang dapat memecah masyarakat. Kondisi ini ditunjang adanya kecanggihan teknologi alat komunikasi, pendidikan politik belum merata, serta mudahnya akses informasi. Setiap orang dapat mengakses informasi

secara bebas melalui media sosial. Berbicara kemudahan akses informasi tidak dapat dipisahkan dengan media. Dimilikinya beberapa media mainstream Idealnya pemberitaan yang tidak benar atau hoaks setidaknya memberikan peluang kepada masyarakat dan institusi mempunyai KTP jelas.

Toleransi menjadi hal penting, manakala adanya indikasi hal-hal sebagai berikut yang berpotensi membawa dampak disintegrasi, yaitu: *Pertama*, munculnya penggunaan politik identitas yang dapat memecah masyarakat. *Kedua*, kecanggihan teknologi alat komunikasi belum merata. *Ketiga*, mudahnya akses informasi. Dampak positif media yaitu: 1) Institusi pencerahan masyarakat /media edukasi; 2) Media informasi, yaitu media yang setiap saat Menyampaikan informasi kepada masyarakat luas, bukan individu atau kelompok. Adapun dampak negatif media adalah: 1) Pandangan negatif masyarakat yang memunculkan sikap apatis, dan 2) Black campaign dan lain sebagainya. Oleh karena itu tim pengabdian kepada masyarakat menyampaikan materi yang dimaksudkan agar generasi milenial mampu menjadi pemilih cerdas adalah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan pertimbangan rekam jejak, visi misi, dan program kerjanya kandidat yang berkompetisi, memiliki komitmen melawan *money politic*, dan tidak mudah terpengaruh berita hoaks.

3. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan, bahwa munculnya penggunaan politik identitas oleh peserta Pemilu tahun 2024 yang tidak diimbangi spirit toleransi berpotensi menimbulkan disintegrasi

bangsa. Kemampuan memanfaatkan teknologi informasi harus dibekali dengan literasi digital agar masyarakat mampu memilah informasi. Pendidikan politik yang memadai dapat mendorong partisipasi pemilih cerdas untuk menghasilkan pemilih yang berintegritas dan berkualitas. Saran yang dapat direkomendasikan perlu upaya yang terus menerus dari berbagai pihak, khususnya dari perguruan tinggi untuk memberikan pendidikan politik kepada generasi milenial, agar memiliki kesadaran melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik, selain mengembangkan toleransi untuk menangkal isu-isu primordialisme yang berdampak disintegrasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Semarang, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Kepala Desa Kenteng Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang, Sekretaris Desa Kenteng Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang, serta seluruh anggota Karang Taruna Desa Kenteng Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang selaku peserta kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

REFERENSI

- Imron, A. (2014). Ketua Bawaslu RI: Pemilu Demokratis, Harus Memenuhi Empat Syarat. *Bawaslu*. <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/ketua-bawaslu-ri-pemilu-demokratis-harus-memenuhi-empat-syarat>.
- Junaidi, V. (2013). *PELIBATAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN PEMILU Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Bekerjasama dengan The Asia Foundation (TAF)*. www.perludem.or.id
- Muhtar, H. (2015). *Politik Primordialisme dalam Pemilu di Indonesia*. UB Press. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=qydSDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=pendekatan+primordial+dalam+pemilu&ots=UfkjMsZak5&sig=P2cMP6KqQH RWsbikicbcWV6Jj6U&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- Rahman, F. A., Mohd, K., & Hambali, K. (2013). *Religious Tolerance in Malaysia: Problems and Challenges*. 3, 81–92.
- RI, B. (2020). Presiden Republik Indonesia Peraturan Presiden Republik Indonesia. *Demographic Research, 1999*, 4–7.
- Setiawan, S. A. and Puspitasari, N. (2018) „Preferensi Struktur Organisasi Bagi Generasi Millennial“, *Jurnal Borneo Administrator*, 14(2), pp. 101–118. doi: 10.24258/jba.v14i2.336.
- Soeharso, S. (2019) „Politik Primordial vs Penguatan Identitas Nasional“, *Kumparan.com*, April. Available at: <https://kumparan.com/sonny-soeharso/politik-primordial-vs-penguatan-identitas-nasional-1qz0LIXLPVe/4>.

- Yunita, R. K. (2022) „Mayoritas Kaum Milenial dan Generasi Z Antusias Ikuti Pemilu 2024“, *kompas.id*, April. Available at: <https://www.kompas.id/baca/pohuk/2022/04/08/87-persen-milenial-dan-generasi-z-antusias-ikuti-pemilu-2024>.
- Surbakti, R., Karim, A. G., Nugroho, K., Sujito, A., & Fitrianto, H. (2014). *Integritas Pemilu 2014: Kajian Pelanggaran, Kekerasan, dan Penyalahgunaan Uang pada Pemilu 2014*. 199.
- Budiharjo, Miriam, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, p. 368